

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan hidup yang bersifat global dan terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, intensitas aktivitas manusia, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan volume timbunan sampah yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi kesehatan, kualitas lingkungan, maupun aspek sosial ekonomi masyarakat. Mellyanawaty et al. (2021) menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh langsung terhadap meningkatnya volume sampah, dan apabila tidak disertai penyediaan lahan serta fasilitas pengelolaan yang memadai, maka penumpukan sampah akan terus terjadi dan memperburuk kondisi lingkungan. Sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar pembangunan negara di dunia.



Gambar 1.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sumber : Bappenas

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjadi rencana aksi dunia untuk kurun waktu 15 tahun, terhitung sejak tahun 2015 hingga 2030. SDGs memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan berisi 17 tujuan yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sustainable Development Goals mencakup berbagai tujuan yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan termasuk tujuan yang berfokus pada pengelolaan sampah. Tujuan yang memiliki relevansi langsung dengan pengelolaan sampah adalah Tujuan ke 11 dan 12. Pada tujuan 11 *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan) menekankan pentingnya menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut mencerminkan pentingnya upaya dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta terhindar dari permasalahan sampah. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengembangan program bank sampah. Bank sampah yang diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat dinilai mampu meningkatkan kepedulian lingkungan,

membentuk komunitas sadar sampah, serta mendukung pengelolaan sampah mulai dari tingkat desa (Sulistiyani & Wulandari, 2017). Pada Tujuan 12 *Responsible Consumption and Production* (Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan) berkaitan dengan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan yang menuntut perubahan perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah. Pencapaian tujuan ini memerlukan pembiasaan, sosialisasi, dan edukasi mengenai pengelolaan sampah, mulai dari pemahaman terkait sumber dan jenis sampah hingga praktik pengelolaan yang dapat dilakukan secara mandiri. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle (3R)* menjadi pendekatan strategis untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan serta mendorong masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan sampah (Sekarsari & Trianti, 2020).

Permasalahan sampah merupakan isu global yang dihadapi oleh berbagai negara akibat semakin meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Meskipun setiap negara memiliki faktor penyebabnya masing-masing, namun salah satu penyebab utama adalah bertambahnya produksi barang konsumsi seiring dengan pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif.. Barang-barang konsumsi tersebut pada akhirnya menjadi sampah yang menambah beban pengelolaan bagi pemerintah. Sampah juga menjadi masalah lingkungan yang signifikan karena dapat merusak keindahan kota, menimbulkan bau tidak sedap, menyebabkan penyakit, serta mengancam keberlangsungan makhluk hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Kompleksitas pengelolaan sampah ini semakin dirasakan oleh banyak negara, terutama negara berkembang, yang umumnya menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan kapasitas pengelolaan.

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pengelolaan sampah termasuk dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan. Pelayanan pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan baik agar berjalan efektif dan efisien serta mampu memberikan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang menuntut adanya kinerja aparatur pemerintah yang baik agar pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelayanan publik, kinerja merupakan aspek penting karena mencerminkan sejauh mana tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Aparatur dituntut untuk mampu menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, serta adaptif terhadap dinamika permasalahan persampahan yang semakin kompleks.

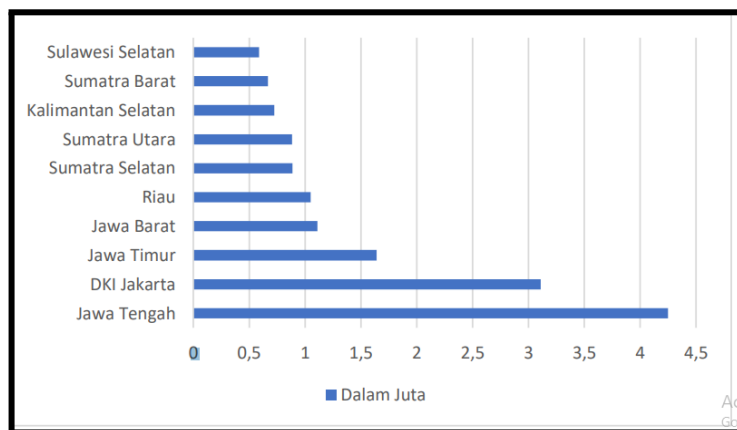
Di Indonesia permasalahan sampah terus menjadi tantangan besar karena tingginya volume sampah yang tidak tertangani dan masih terbatasnya infrastruktur yang memadai. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2024 tercatat bahwa total timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 37,311,750.55 ton. Dari total timbulan sampah tersebut 32.2% berhasil terkelola dan 67.8% tidak terkelola. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 286,6 juta jiwa apabila tidak disertai dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, maka volume sampah diperkirakan akan

terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah (Christina et al., 2015).

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi setiap kota ataupun daerah adalah pengelolaan dan penanganan sampah yang terus meningkat seiring waktu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan memberikan pelayanan yang baik melalui penyelenggaraan tata kelola lingkungan. Hukum yang mengatur kinerja organisasi publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor lingkungan hidup. Selain itu, Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik juga mengatur evaluasi terhadap kinerja pelayanan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan pemerintah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Urgensi kebijakan ini semakin mendesak ketika melihat kenyataan bahwa volume timbulan sampah di berbagai provinsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menandakan perlunya penguatan sistem pengelolaan sampah di tingkat

daerah guna memastikan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif. Adapun data provinsi dengan timbulan sampah terbesar di Indonesia pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Gambar 1.2 Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak di Indonesia (2023)

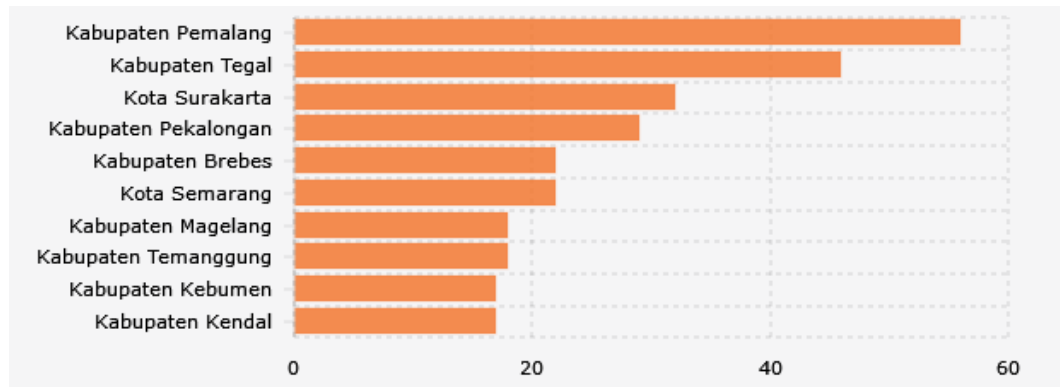
Sumber : Katadata.co.id (2023)

Berdasarkan gambar 1.2, Provinsi penghasil sampah terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024 Provinsi ini tercatat sebagai provinsi ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 38.280.887 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang padat cenderung menghasilkan volume sampah yang lebih besar. Besarnya jumlah penduduk di Jawa Tengah menjadikan provinsi ini sebagai salah satu penyumbang utama timbulan sampah nasional. Hal tersebut menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengelola sampah secara lebih optimal. Salah satu permasalahan besar yang dialami oleh setiap kota ataupun daerah adalah masalah pengelolaan dan penanganan sampah yang seakan tidak ada habisnya untuk diselesaikan. Dimana sampah semakin hari terus menerus bertambah, maka dari itu sampah menjadi

persoalan yang sangat serius terutama bagi sektor lingkungan hidup. Persoalan kebersihan lingkungan merupakan persoalan jangka panjang yang penanganannya memerlukan waktu, usaha, dan tidak dapat diabaikan. Apabila terdapat penundaan atau keterlambatan dalam penanganan, maka upaya penanggulangannya akan menjadi semakin berat dan memerlukan waktu yang lebih lama.

Tingginya timbulan sampah yang tidak tertangani dengan baik sering kali menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, salah satunya adalah munculnya kawasan permukiman kumuh. Penumpukan sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal menyebabkan kondisi permukiman menjadi kotor, tidak sehat, dan sulit diakses oleh layanan kebersihan. Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni. Ketidaklayakan hunian tersebut dapat diketahui dengan ciri-ciri tidak teraturnya bangunan, jaringan jalan tidak diperkeras, sanitasi umum, drainase tidak berfungsi, pembuangan air limbah masih buruk, persampahan belum dikelola dengan baik, kurangnya proteksi kebakaran serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Budiharjo 2005). Kondisi tersebut sering kali berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah yang tidak tertangani dengan baik sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan di Jawa Tengah tidak terlepas dari keberadaan permukiman kumuh yang menjadi indikator penting dalam menggambarkan kondisi kebersihan dan pengelolaan sampah di suatu wilayah. Untuk memperkuat gambaran tersebut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan jumlah desa kumuh yang cukup tinggi. Kabupaten Pemalang

tercatat menempati urutan pertama dengan 56 desa kumuh. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :



Gambar 1.3 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang Miliki Desa dengan Permukiman Kumuh Terbanyak

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Gambar 1.3, terdapat 419 desa di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pemalang menempati posisi tertinggi dengan 56 desa kumuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Kabupaten Pemalang masih cukup kompleks, terutama dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan permukiman. Timbunan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi lingkungan, hingga memunculkan kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat. Permukiman kumuh tersebut tidak hanya menggambarkan persoalan keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesejahteraan masyarakat, tetapi juga erat kaitannya dengan persoalan sampah. Pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator yang menjadi tolak ukur wilayah tersebut dikatakan sebagai permukiman kumuh. Lingkungan dengan

kondisi tidak tertata dan minim sarana prasarana kebersihan berpotensi meningkatkan timbulan sampah serta memperburuk kualitas lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengatasi persoalan lingkungan.

Terkait persoalan lingkungan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas pokok terkait pengelolaan lingkungan yang meliputi upaya peningkatan kebersihan, pengelolaan dan pengangkutan sampah, serta penataan lingkungan. Tanggung jawab tersebut menuntut Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan terselenggaranya pelayanan di bidang persampahan dan kebersihan secara efektif, terencana, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus berupaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Usaha Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan tersebut tercermin dari serangkaian kinerja yang telah dilakukan, terutama dalam menghadapi permasalahan lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang semakin kompleks.

Pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang tanggap dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan harus mampu lebih proaktif dalam menanggapi permasalahan.

Pelaksanaan program pengelolaan sampah seharusnya mampu menjawab permasalahan pengelolaan lingkungan serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kinerja organisasi merupakan hasil capaian yang dihasilkan melalui proses kerja bersama antar anggota dan seluruh unsur organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sembiring, 2012). Kinerja organisasi merupakan elemen yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu objek perhatian dalam kajian birokrasi, karena berhubungan langsung dengan tingkat profesionalisme serta kesiapan aparatur dalam melaksanakan tugas. Suatu organisasi dapat dikategorikan memiliki kinerja yang baik apabila mampu memenuhi berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah ditetapkan dalam kerangka organisasi. Menurut Suryani (2023), penelitian terkait kinerja organisasi membantu organisasi memahami dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja, sehingga dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk mencapai tujuan organisasi.

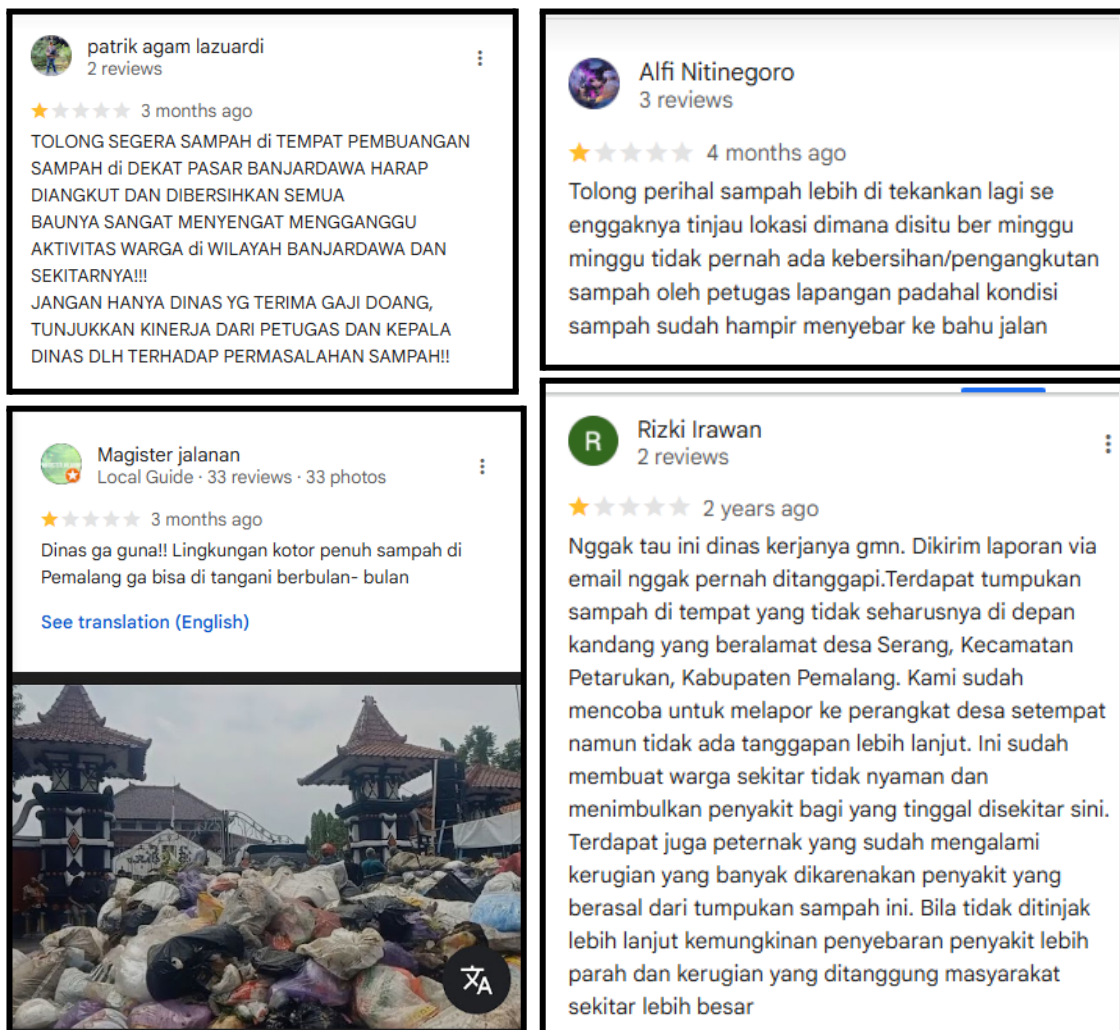
Kenyataan yang terjadi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya masih menghadapi sejumlah kendala dalam merealisasikan target kinerja, khususnya dalam indikator penanganan dan pengurangan sampah. Dalam pengelolaan sampah, kinerja yang ideal seharusnya tidak hanya mengandalkan hasil akhir, tetapi juga memperhatikan sarana dan prasarana yang digunakan. Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah baik atau buruk akan sangat berdampak kepada masyarakat. Permasalahan utama tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan

sarana prasarana maupun meningkatnya volume timbulan sampah, tetapi juga menyangkut aspek pelayanan publik yang diberikan. Menurut Agus Dwiyanto (2006:50), kinerja organisasi publik dapat diukur melalui lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang, indikator yang paling menunjukkan kelemahan adalah responsivitas.

Hal ini tercermin dari berbagai keluhan masyarakat yang tidak segera ditindaklanjuti, keterlambatan pengangkutan sampah yang menimbulkan penumpukan di berbagai titik, serta kurangnya kesiapan instansi dalam memberikan solusi atas permasalahan mendesak seperti tidak berfungsinya TPA Pesalakan. Ulasan negatif masyarakat melalui platform digital, khususnya Google Review, memperkuat fakta bahwa daya tanggap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam merespons kebutuhan dan pengaduan publik masih rendah. Rendahnya responsivitas tersebut menegaskan bahwa persoalan daya tanggap instansi terhadap kebutuhan masyarakat menjadi titik lemah utama yang menyebabkan kinerja pengelolaan sampah belum optimal. Aspek responsivitas perlu mendapat perhatian lebih sebagai indikator dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang.

Masyarakat belum puas dengan layanan yang diterima, hal ini membuat pelayanan publik yang diberikan masih jauh di bawah ekspektasi masyarakat. Banyak masyarakat yang memberikan keluhan di media sosial. Keluhan masyarakat sebagai penerima layanan publik sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pemalang. Bukti nyata ketidakpuasan masyarakat tersebut dapat dilihat dari sejumlah ulasan negatif yang ditinggalkan di platform *Google Review*. Berikut gambar *Google Review* yang menunjukkan keluhan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang :



Gambar 1.4 Ulasan Google Review Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Sumber : DLH.Pemalang, 26 Maret 2025

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat sebagai pengguna layanan pengelolaan sampah terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya. Keluhan-keluhan tersebut terekam melalui platform digital *Google Review* yang menggambarkan ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, khususnya dalam aspek pengangkutan dan penanganan sampah. Beberapa ulasan menyebutkan bahwa sampah tidak diangkut secara rutin oleh petugas, bahkan dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan penumpukan sampah di berbagai titik, seperti di tepi jalan dan area pasar. Kondisi ini menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan serta aktivitas masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat pula pengaduan terkait laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait, menunjukkan lemahnya responsivitas instansi dalam menanggapi keluhan publik.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal ini juga tercermin dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa beberapa indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Permasalahan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah tidak hanya tampak di lapangan, tetapi juga terekam dalam hasil evaluasi kinerja instansi. Berikut tabel capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pemalang (2024)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Pencemaran Udara	89,53	92,83	103,69	ST
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Pencemaran Air	47,59	48,33	101,55	ST
3.	Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	100	66,67	66,67	S
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	100	100	100	ST
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	100	100	ST
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	60	60	100	ST
5.	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	43,087	43,083	99,99	ST
		Persentase penanganan lahan kritis	0,0663	0,000154	0,23	SR
6.	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	70,95	50,46	71,12	S
		Persentase pengurangan sampah	27,89	25	89,64	T
7.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	80,61	80,42	99,76	ST
		Nilai SAKIP	64	64,44	100,69	ST

Sumber : LKJiP Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan hasil yang bervariasi. Salah satu isu lingkungan yang masih menjadi tantangan utama adalah pengelolaan sampah. Pada indikator penanganan sampah, realisasi kinerja mencapai 50,46% dari 70,95% dan tergolong dalam kategori *sedang*. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam pengangkutan dan pengolahan sampah, namun hasilnya belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan, pada indikator Pengurangan Sampah juga menunjukkan capaian yang rendah, yaitu hanya 25% dari target 27,89%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengurangan timbulan sampah melalui program berbasis masyarakat maupun penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum berjalan secara maksimal dan konsisten. Untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang, dapat diperhatikan pada Tabel 1.2 berikut yang menyajikan perbandingan target dan realisasi kinerja selama periode 2022–2024 :

Tabel 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja (2022-2024)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase Penanganan sampah	72,92	59,50	71,83	59,60	70,95	50,46
	Persentase pengurangan sampah	25,88	25,88	26,94	25,91	27,89	25,00

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2, Capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) belum stabil karena belum

memenuhi target yang telah ditetapkan secara konsisten. Pada indikator penanganan sampah, capaian kinerja menunjukkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi selama tiga tahun berturut-turut, yang mencerminkan masih adanya hambatan dalam pelaksanaan program pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah. Sedangkan, indikator pengurangan sampah juga belum menunjukkan peningkatan signifikan, bahkan mengalami penurunan pada tahun terakhir, yang menandakan bahwa program pengurangan sampah seperti pemilahan, daur ulang, dan pengolahan mandiri belum berjalan optimal. Capaian tersebut belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, bahkan justru cenderung mengalami penurunan pada tahun terakhir, yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi pengelolaan sampah yang diterapkan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat meningkatnya aktivitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Pematang Jaya. Kondisi ini menuntut peran aktif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Peningkatan tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, baik dari segi sarana prasarana, sistem pengangkutan, maupun mekanisme penanganan aduan masyarakat. Melihat adanya permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya, maka upaya pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkelanjutan, karena permasalahan sampah dapat menghambat pelestarian lingkungan serta mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Pada dasarnya, instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sumber daya manusia,

karena unsur ini menjadi salah satu faktor penentu utama bagi keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi. Pentingnya peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, menuntut instansi ini untuk memiliki kinerja yang baik dan selaras dengan tugas, pokok, dan fungsi dari masing-masing unsur organisasi dalam lingkup pengelolaan lingkungan hidup.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan pendekatan strategis yang mencerminkan tanggung jawab dan fungsi dinas dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Pelaksanaan kinerja ini juga sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021–2026, yaitu misi ke-6: “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”, yang salah satunya diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan persampahan. Dalam pelaksanaannya, kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah mencakup dua aspek penting, yakni penanganan sampah dan pengurangan sampah. Penanganan sampah dilakukan melalui pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir, sedangkan pengurangan sampah lebih menitikberatkan pada upaya di tingkat sumber, seperti pemilahan, daur ulang, dan pembatasan timbulan sampah oleh masyarakat secara mandiri.

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten pemalang harus mampu merespon dan mengatasi segala macam persoalan lingkungan hidup dan kebersihan. Melalui tugasnya dalam pengangkutan, pengelolaan, dan penataan sampah, Dinas

Lingkungan Hidup dituntut untuk mampu memberikan kinerja yang optimal agar permasalahan sampah tidak menjadi semakin kompleks. Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 6 Ayat (2), bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dilakukan oleh instansi yang menangani persampahan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, yang terdiri beberapa poin sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat.
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah.
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Selain itu, instansi ini juga bertanggung jawab dalam penyediaan tempat sampah bagi rumah tangga di setiap kawasan, melaksanakan pengangkutan sampah dari sumbernya menuju TPS, TPST, maupun TPA, serta memastikan terselenggaranya ketertiban dalam pemilahan sampah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai.

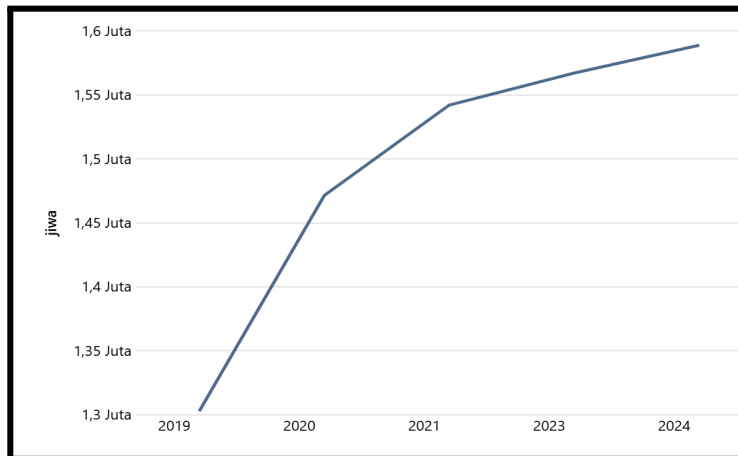
Setiap bentuk aktivitas manusia baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, secara alamiah akan menghasilkan sisa material yang tidak lagi memiliki nilai guna dan berpotensi menjadi barang buangan berupa limbah maupun sampah. Sampah terdiri dari zat organik dan anorganik, dianggap tidak dapat digunakan lagi dan merupakan salah satu unsur penyebab degradasi lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Produksi sampah yang terus meningkat menjadi tantangan serius dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain

pencemaran lingkungan, penurunan derajat kesehatan masyarakat, hingga terganggunya kualitas estetika dan kenyamanan suatu wilayah.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pihak yang turut membantu tugas dan tanggung jawab pemerintah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan atau pengatur tata kelola sampah melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang berada di setiap daerah otonom. Sedangkan, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mendukung setiap kebijakan dan program yang dibuat pemerintah terkait pengelolaan sampah. Pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap persoalan sampah, karena semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan lahan dan sarana pengelolaan sampah semakin besar.

Mellyanawaty et al., (2021) menyatakan menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh langsung terhadap meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Jika peningkatan jumlah sampah tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang memadai, maka penumpukan sampah akan terus terjadi.. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat juga mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat setiap tahunnya bertambah banyak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menghuni di wilayah tersebut. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Pemalang. Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga berpotensi meningkatnya

jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Pemalang. Berikut data Jumlah Penduduk di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 :



Gambar 1.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang

Sumber : katadata.co.id (2024)

Berdasarkan gambar di atas, jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk masih berada di angka sekitar 1,3 juta jiwa, kemudian terus meningkat hingga mencapai 1,6 juta jiwa pada tahun 2024. Kenaikan jumlah penduduk ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat, termasuk dalam konsumsi barang dan jasa. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat produksi sampah juga mengalami peningkatan. Jika tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, maka peningkatan jumlah penduduk ini berpotensi memperburuk permasalahan lingkungan, seperti penumpukan sampah, pencemaran, dan berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Hal ini menjadi sangat serius didukung oleh tingkat kesadaran dan perilaku penduduk yang kurang kepekaannya terhadap lingkungan. Berdasarkan data dari

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang, menunjukkan tren produksi sampah yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Produksi Sampah di Kabupaten Pemalang (Ton/hari)

Tahun	Produksi Sampah (Ton/Hari)	Terangkut (Ton/Hari)	Persentase Terangkut (%)	Sisa (Ton/Hari)	Persentase Sisa (%)
2020	350	246	70,29 %	104	29,71 %
2021	522	278	53,26 %	244	46,74 %
2022	460	263,6	57,30%	196	42,60 %
2023	597	270	45,23 %	327	53,56 %
2024	615	260	42,28 %	355	57,72 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang 2020 - 2024

Tabel tersebut memperlihatkan volume sampah di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan diprediksikan akan terus meningkat. Berdasarkan tabel pertumbuhan penduduk dan timbulan sampah tersebut, terlihat bahwa peningkatan volume sampah merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari bertambahnya jumlah penduduk. Oleh sebab itu, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang disertai dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah memegang peran penting dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan tertata. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang semakin serius dan memerlukan penanganan khusus terkait kondisi sampah. Persentase angka pengangkutan sampah di atas menunjukkan bahwa pengangkutan sampah tidak mengalami peningkatan yang signifikan sementara jumlah timbulan sampah terus mengalami peningkatan. Ketidakseimbangan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai

faktor, salah satunya adalah keterbatasan jumlah unit TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Kabupaten Pemalang memiliki 137 TPS (Tempat Penampungan Sementara). Namun, keberadaannya belum cukup mampu menjawab permasalahan timbulan sampah yang semakin kompleks. Hal ini dikarenakan fungsi TPS hanya sebatas menampung sampah sebelum diangkut ke TPA, tanpa melalui proses pengolahan. Sementara itu, kebutuhan akan TPS3R yang dapat mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah menjadi semakin mendesak. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, kebutuhan ideal unit TPS3R mencapai 28 unit, sedangkan jumlah yang tersedia baru sekitar 17 unit. Ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan TPS3R ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah. Selain jumlah yang masih terbatas, distribusi TPS3R juga belum merata di seluruh kecamatan, sehingga masih terdapat wilayah yang kekurangan sarana pengolahan sampah berbasis 3R. Akibatnya, masyarakat di daerah tersebut sering terpaksa membuang sampah di lokasi yang tidak semestinya. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, mulai dari pencemaran lingkungan, potensi masalah kesehatan, hingga penurunan kualitas estetika lingkungan. Berikut tabel kebutuhan ideal Tempat Penampungan Sementara dan Jumlah TPS yang tersedia di Kabupaten Pemalang:

Tabel 1.4 Jumlah dan Kebutuhan TPS 3R setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Sampah (Ton)	Jumlah TPS 3R	Kebutuhan TPS 3R
1.	Moga	35.98	1	1
2.	Warungpring	20.84	0	2
3.	Pulosari	28.23	1	1
4.	Belik	57.34	2	1
5.	Watukumpul	39.19	0	2
6.	Bodeh	30.20	0	2
7.	Bantarbolang	45.01	0	3
8.	Randudongkal	53.31	0	3
9.	Pemalang	96.34	9	0
10.	Taman	94.65	0	5
11.	Petarukan	84.59	3	2
12.	Ampelgading	35.34	0	2
13.	Comal	39.97	1	1
14.	Ulujami	55.48	0	3
Total		716.47	17	28

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Dari data tersebut, terlihat bahwa total timbulan sampah dari seluruh kecamatan mencapai 716,47 ton, sementara jumlah TPS 3R yang tersedia hanya 17 unit, jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 28 unit. Beberapa kecamatan seperti Pemalang dan Taman tercatat memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi, yaitu masing-masing sebesar 96,34 ton dan 94,65 ton, namun masih belum memiliki jumlah TPS 3R yang mencukupi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara timbulan sampah dan kapasitas fasilitas penampungan yang tersedia, yang berpotensi menyebabkan penumpukan sampah dan pembuangan sampah sembarangan. Bahkan beberapa kecamatan seperti Warungpring dan Bantarbolang tidak memiliki TPS 3R sama sekali, padahal tetap menghasilkan sampah sebesar 20,84 ton dan 45,01 ton. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan

infrastruktur persampahan di Kabupaten Pemalang belum merata, dan perlu adanya perencanaan serta pemerataan TPS 3R agar pengangkutan dan penanganan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah. Tidak hanya persoalan keterbatasan TPS 3R saja, tetapi juga TPS (Tempat Penampungan Sementara).

Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan fasilitas penampungan awal yang bersifat sementara sebelum sampah diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Ketersediaan TPS yang memadai sangat berperan dalam menjaga keteraturan pengelolaan sampah dan mencegah terjadinya penumpukan sampah di lingkungan masyarakat. Namun, di Kabupaten Pemalang, penyediaan unit TPS oleh Dinas Lingkungan Hidup masih tergolong minim dan belum sebanding dengan volume timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Kondisi ini menyebabkan banyak TPS yang ada mengalami kelebihan kapasitas (*overload*), sehingga sampah meluber hingga ke pinggir jalan dan mengganggu estetika serta kenyamanan lingkungan. Akibatnya, sebagian besar masyarakat yang kesulitan mengakses TPS terdekat akhirnya memilih untuk membuang sampah sembarangan. Fenomena ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Kesenjangan antara jumlah timbulan sampah dan volume sampah yang berhasil diangkut mencerminkan adanya hambatan dalam sistem pengelolaan sampah.. Hal ini menyebabkan tumpukan sampah di beberapa TPS, bahkan meluber ke badan jalan. Kondisi ini terlihat jelas di beberapa lokasi TPS di Kabupaten Pemalang mengalami *overload* karena volume timbulan sampah tidak sebanding dengan daya tampung fasilitas.

Berikut gambar beberapa timbunan sampah yang terjadi di TPS Kabupaten Pemalang :



Gambar 1.6 Timbunan sampah di TPS Petarukan, Kabupaten Pemalang



Gambar 1.7 Timbunan sampah di TPS Bojong Bata, Kabupaten Pemalang



Gambar 1.8 Timbunan sampah di TPS Widuri, Kabupaten Pemalang

Kondisi tumpukan sampah yang terlihat di beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kabupaten Pemalang sebagaimana ditunjukkan pada gambar diatas, menggambarkan betapa seriusnya permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi. TPS yang ada banyak mengalami kelebihan kapasitas akibat volume sampah yang tidak sebanding dengan kemampuan daya tampung serta frekuensi pengangkutan yang terbatas. Ironisnya, permasalahan ini diperparah oleh tidak berfungsinya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara optimal. Ketika TPA tidak aktif atau tidak dapat dioperasikan secara maksimal, maka proses akhir dari sistem pengelolaan sampah terputus. Hal ini menyebabkan sampah menumpuk di TPS karena tidak bisa segera diangkut dan diproses sesuai prosedur. Pada awal September 2023, terjadi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pesalakan di Desa Pegongsoran, Kabupaten Pemalang. Permasalahan kebakaran ini memiliki faktor utama yaitu tingginya angka tumpukan sampah di TPA yang menyebabkan tingginya kandungan gas metana dan beresiko terjadinya percikan api.

Kondisi TPA yang tidak berfungsi optimal tersebut berdampak langsung pada TPS, karena sampah yang menumpuk di TPS tidak dapat segera dipindahkan. Akibatnya, volume sampah di TPS semakin meningkat dan seringkali meluber ke jalan. Selain itu, permasalahan yang menjadi kendala utama yang menyebabkan penumpukan sampah di berbagai TPS adalah keterbatasan armada pengangkut. Minimnya sarana dan prasarana pendukung tentu berdampak langsung terhadap frekuensi pengangkutan. Berdasarkan data tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang hanya memiliki 36 unit truk sampah, 1

truk container, 7 armada roda tiga, dan 1 truk tinja. Dengan total hanya 45 unit armada, jelas jumlah ini belum mampu mengimbangi kebutuhan pengangkutan sampah yang terus meningkat di 14 kecamatan. Berikut data Kebutuhan *Dump Truck* di Kabupaten Pemalang:

Tabel 1.5 Kebutuhan Dump Truck

Tahun	2022	2023	2024	2025
Jumlah	45	45	45	45
Kebutuhan	161	166	173	181

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.5, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah armada yang tersedia dan kebutuhan riil di lapangan. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap keterlambatan pengangkutan sampah, peningkatan volume sampah yang tertimbun di TPS, serta beban berlebih pada TPA yang sudah tidak berfungsi secara optimal. Rancangan penanganan sampah di Kabupaten Pemalang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dengan lima langkah yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir. Permasalahan sampah dapat diatasi dengan melakukan penanganan sampah sesuai dengan aturan yang ada dan partisipasi masyarakat agar terjalinnya kerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Namun, Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, baik dari segi jumlah TPS 3R, jumlah *dump truck*, maupun TPA, menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam tata kelola lingkungan di Kabupaten Pemalang. Selain berdampak langsung pada

pencemaran lingkungan dan terganggunya aktivitas masyarakat sekitar, hal ini juga menjadi indikator lemahnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup semestinya tidak hanya fokus pada aspek pengangkutan, tetapi juga memastikan siklus pengelolaan sampah dapat berjalan utuh, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Menurut Permen LHK No. 14 Tahun 2021, pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan mulai dari sumbernya hingga ke pemrosesan akhir, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Ketika TPA tidak aktif maka prinsip ini jelas tidak terpenuhi dan risiko pencemaran serta gangguan kesehatan masyarakat pun meningkat. Warga Kabupaten Pemalang terus mengeluhkan kondisi TPS yang tidak terangkut secara rutin. Akibatnya, sampah menumpuk hingga menggunung dan nyaris menutup akses jalan, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, dan mencemari lingkungan sekitar.

Permasalahan penanganan sampah di Kabupaten Pemalang bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah menjadi persoalan yang berlangsung dari tahun ke tahun dan belum terselesaikan secara optimal. Dalam hal pengelolaan sampah dapat diketahui bahwa Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang masih belum dapat dikatakan maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya kinerja instansi yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan sampah berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang yang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah. DLH Kabupaten Pemalang dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan. Di sisi lain, masih terbatas penelitian terdahulu yang secara spesifik mengkaji kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah secara komprehensif.

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dijelaskan, menandakan bahwasanya kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang masih belum sepenuhnya optimal dalam pengelolaan sampah. Minimnya pencapaian ini memperkuat urgensi untuk mengevaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah. Melihat kondisi dan permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, dengan pertanyaan penelitian: “Mengapa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah belum optimal?”. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang serta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerjanya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan maupun perbaikan pelayanan pengelolaan sampah agar pelaksanaannya dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Meningkatnya timbulan sampah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya di Kabupaten Pemalang.
2. Terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah dan SDM Pengelola sampah di Kabupaten Pemalang.
3. Keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tidak sebanding dengan jumlah timbulan yang ada sehingga TPA Kabupaten Pemalang ditutup.
4. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang belum memenuhi target dalam tiga tahun terakhir (2022-2024).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang?
2. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat terkait kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang.
2. Untuk Mengidentifikasi faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang.

1.5 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, berikut uraiannya antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya kajian ilmiah di bidang administrasi publik. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan fenomena, khususnya yang berkaitan dengan analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti serta menjadi sarana untuk menerapkan dan menyampaikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, serta diharapkan memberikan sumbangan alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.6 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis dan Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Putri Dwi Cahyani, Abdul Kadir Adys, Abdi; Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gowa (2021);	Metode : Kualitatif. Teori : Teori Kinerja Birokrasi atau Organisasi Publik menurut Dwiyanto dalam (Sudarmanto, 2014: 16) : - Produktivitas - Kualitas layanan - Responsivitas - Responsibilitas - Akuntabilitas	Untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gowa.	Penelitian di Kabupaten Gowa menemukan kinerja pengelolaan sampah belum maksimal. Produktivitas kinerja masih rendah karena target pengurangan sampah tidak tercapai, sarana prasarana kurang, dan transparansi data persampahan masih lemah.
2.	Yolanda Laksita Devi, Yuwanto, Supratiwi; <i>Performance Analysis of the Semarang Old Town Area Management Agency</i> (Analisis Kinerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (2024));	Metode : Kualitatif. Teori : Teori Pengukuran Kinerja dari Agus Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009: 16), yaitu : - Produktivitas - Kualitas layanan - Responsivitas - Responsibilitas - Akuntabilitas	Untuk Menganalisis Kinerja BPK2L Semarang dalam Mengelola, Mengembangkan, dan Mengoptimalkan Kawasan Kota Lama.	Hasil penelitian menunjukkan kinerja BPK2L periode 2018–2023 belum optimal. Produktivitas rendah karena lemahnya konservasi, revitalisasi, dan pengawasan. Kualitas pelayanan, khususnya perizinan, belum sesuai SOP. Responsivitas dinilai kurang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

NO	Nama Penulis dan Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Tujuan	Hasil Penelitian
		Teori Partisipasi dari I Nyoman Sumaryadi (2010: 46)		Responsibilitas hanya sebatas pelengkap regulasi, sementara akuntabilitas lemah akibat laporan kinerja tidak transparan. Selain itu, partisipasi masih minim dan masyarakat masih salah persepsi terhadap peran BPK2L.
3.	Stefhanie Dalen, Enos Paselle, Santi Rande; Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda (2021);	Metode : Kualitatif Teori : Teori Kinerja menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16), yaitu : - Produktivitas - Kualitas layanan - Responsivitas - Responsibilitas - Akuntabilitas	Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Kinerja dan Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda.	Kinerja DP2PA Samarinda dinilai cukup baik, namun masih terkendala minimnya anggaran, sarana prasarana, SDM ahli, serta keterbatasan gedung kantor yang memengaruhi efektivitas dan aksesibilitas layanan.
4.	Hanna Marice Bleskadit, Johannis Kaawoan, Neni Kumayas; Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Provinsi Papua Barat (2020);	Metode : Kualitatif. Teori : Teori dari Russel dalam Sudarmanto yang mengatakan bahwa Kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan tugas seluruh pegawai dalam upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dari suatu organisasi.	Untuk Mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Provinsi Papua Barat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pelayanan di Disdukcapil Kota Sorong masih belum maksimal karena fasilitas terbatas, pegawai kurang disiplin, layanan lambat, serta minim transparansi dan ketidakadilan dalam pelayanan.
5.	Fernando Ghana Dearvigo, Dra.	Metode : Kualitatif.	Untuk Menganalisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

NO	Nama Penulis dan Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Tujuan	Hasil Penelitian
	Dewi Rostyaningsih, M.Si., Dra. Hesti Lestari, MS; Analisis Kinerja DPMPTSP Kabupaten Blora dalam Pemberian Layanan Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (2023)	Teori : Teori yang digunakan adalah teori kinerja organisasi oleh Agus Dwiyanto dan teori kinerja organisasi oleh Selim dan Woodward.	Kinerja DPMPTSP Kabupaten Blora dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Blora serta Faktor Penghambatnya.	Kinerja DPMPTSP Blora belum optimal, terutama pada mutu layanan, daya tanggap, dan akuntabilitas, dengan kendala utama jaringan, keterbatasan kewenangan, dan SDM yang belum memadai.
6.	Erwin Nugraha Purnama , Dapot Pardamean Saragih, Ransta Lewina Lekatompessy, Fransin Kontu, Iqbal Saputra; Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah di Kota Merauke (2024);	Metode : Kualitatif. Teori : Teori Kinerja menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16), yaitu : - Produktivitas - Kualitas layanan - Responsivitas - Responsibilitas - Akuntabilitas	Untuk Meninjau Kinerja dari pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke dalam Penanganan Sampah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja DLH Merauke dalam pengangkutan sampah dinilai cukup baik, namun responsivitas terhadap masyarakat masih rendah meski tanggung jawab pegawai sudah sesuai tupoksi.
7.	Elsya Sonia, Siti Hazzah Nur Ritonga; Performance of the Environmental Agency in Managing Waste in North Rantau District, Labuhanbatu Regency (2024);	Metode : Kualitatif. Teori : Teori Kinerja menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009:16), yaitu : - Produktivitas - Kualitas layanan - Responsivitas - Responsibilitas - Akuntabilitas	Untuk menjelaskan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengelola Sampah di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja DLH Labuhanbatu masih terkendala kekurangan SDM, fasilitas pengangkutan yang terbatas, serta pengelolaan sampah yang belum optimal meski ada upaya perbaikan melalui daur ulang dan sosialisasi.
8.	Gusti Ayu Putu Dina Aryani,	Metode : Kualitatif Deskriptif.	Untuk Mengetahui Kinerja Dinas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

NO	Nama Penulis dan Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Tujuan	Hasil Penelitian
	Putu Nomy Yasintha, Komang Adi Sastra Wijaya; Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Jasa Akomodasi Pariwisata Villa Di Kabupaten Badung (2021);	Teori : Teori Kinerja dari Mahsun (2006) yang mencakup Masukan (input), Proses (process), Keluaran (input), Hasil (outcome), Manfaat (benefit), dan Dampak (impact).	Pariwisata dalam Melakukan Pengawasan terhadap Jasa Akomodasi Pariwisata Villa di Kabupaten Badung.	Kinerja Dinas Pariwisata dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Jasa Akomodasi Pariwisata Villa sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala yakni antara lain keterbatasan SDM, target pengawasan yang sempit serta belum adanya sanksi tegas yang diberikan.
9.	Louis Yeremia Karamoy, Fanley Pangemanan, Alfon Kimbal; Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara(2022));	Metode : Kualitatif. Teori : Teori Kinerja dari Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2007:7) yaitu: Faktor personal/individu, atau Personal Factors, Faktor kepemimpinan, atau Leadership Factors, Faktor tim, atau Team Factors, Faktor sistem, atau System Factors, Faktor kontekstual (situasional), atau Contextual Factors (Situational).	Untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Kabupaten Minahasa Utara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dilihat dari Faktor personal masih lemah karena keterampilan pegawai belum sesuai bidang. Kepemimpinan cukup baik karena pimpinan ikut terjun dan membimbing. Faktor tim belum optimal, koordinasi sering terhambat karena personel tidak hadir. Sistem pelaporan sudah ada tapi belum efektif, ditambah fasilitas minim. Faktor kontekstual terkendala anggaran, SDM belum maksimal, dan pemahaman masyarakat terkait pelaporan kasus masih rendah.
10.	Diah Carissa Chandr Maheswari, Dr. Drs Sampara Lukman, MA;	Metode: Kualitatif Teori: Teori Kinerja Organisasi	Untuk Menguraikan Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja DLHK Denpasar melalui TPS 3R sudah baik dengan pembinaan,

NO	Nama Penulis dan Judul	Metode dan Teori yang digunakan	Tujuan	Hasil Penelitian
	Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah melalui Penyediaan TPS3R di Kota Denpasar (2024);	Mahsun (2006). Tiga dimensi dalam teori ini meliputi Dimensi Organisasi (<i>Input, Process</i>), Dimensi Kinerja (<i>Output, Outcomes</i>), dan Dimensi Evaluasi Kinerja (<i>Benefit, Impact</i>).	pendukung, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.	edukasi, dan pendampingan masyarakat. Namun masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat, keterlambatan aturan adat di desa, serta keterbatasan tenaga ahli dan teknisi alat.
11.	Hery Setiawan, Tjahya Supriatna, Sampara Lukmani; Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Sampah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;	Metode : Kuantitatif Teori : Teori Kinerja Birokrasi Publik (Agus Dwiyanto) - Produktivitas - Kualitas Pelayanan - Akuntabilitas - Responsivitas - Responsivitas	Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di Kabupaten Bengkalis, menganalisis faktor penghambat dan pendukung serta mengetahui strategi yang dilakukan Dinas mengatasi faktor penghambat.	Kinerja DLH Bengkalis dalam penanganan sampah belum baik karena keterbatasan lahan TPA, teknologi belum ramah lingkungan, sosialisasi minim, koordinasi dengan UPT kurang maksimal, kompetensi pegawai rendah, sarana prasarana terbatas, manajemen lemah, serta partisipasi masyarakat rendah.
12.	Suharyo, & Bando. (2021). Analysis Of The Performance Of Government Organizations In Realizing Excellent Services In The Public Sector. In Sttal Postgraduate International Conference.	Metode : Kualitatif Teori : Teori Kinerja Birokrasi Publik (Agus Dwiyanto) - Produktivitas - Kualitas Layanan - Akuntabilitas - Tanggung Jawab - Daya Tanggap	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menganalisis faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan kinerja organisasi.	Hasil penelitian menunjukkan indikator produktivitas baik karena terdapat peningkatan target setiap tahunnya. Daya tanggap terkendala infrastruktur pelayanan yang kurang mendukung seperti kurangnya fasilitas pelayanan pada portal website. Adapun faktor pendukung kinerja dalam yaitu faktor kepemimpinan dan tim dan faktor pengahmbatnya berasal dari pribadi individu.

Berdasarkan sumber penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya penulis mengolah beberapa jurnal yang diketahui menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian-penelitian jurnal terdahulu tersebut adalah untuk menganalisis kinerja yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Penelitian tersebut menggunakan berbagai macam pendekatan ataupun dimensi yang berbeda-beda. Penulis juga menggunakan sumber jurnal internasional dengan tema dan fokus yang hampir sama dengan penelitian ini. Adanya penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa topik penelitian yang akan penulis susun memiliki beberapa kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Hal yang sama pada penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu memiliki fokus yang serupa yaitu mengenai analisis kinerja organisasi sektor publik. Persamaan selanjutnya adalah mengenai metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan yang tampak antara penelitian yang akan penulis susun dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah pada indikator penilaian yang digunakan. Selain itu penulis juga melakukan pengkajian mengenai analisis kinerja dengan mengambil studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pematang Jaya yang belum pernah diteliti secara mendalam sebelumnya. Peneliti juga akan mengidentifikasi secara langsung faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik mencakup semua aspek proses pemerintahan yang tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi ditujukan untuk kepentingan penduduk serta sejalan dengan tujuan bangsa yang sudah ditentukan pada regulasi. Administrasi Publik menggambarkan peran penting pemerintah sebagai agen utama otoritas atau badan pengatur, yang secara aktif terlibat dalam tindakan dan inisiatif regulasi. Tindakan ini dianggap penting atau menguntungkan bagi masyarakat, dengan asumsi bahwa masyarakat bersifat pasif, kurang berdaya, dan oleh karena itu harus tunduk dan menerima peraturan serta arahan pengelola (Yeremias T Keban, 2008).

Felix A. Nigro, yang dikutip dalam Pasolong (2007:27), memberikan definisi luas tentang administrasi publik, yang menggambarkannya sebagai: 1) Upaya kolaboratif di antara kelompok-kelompok dalam lingkup pemerintahan; 2) Meliputi struktur tiga cabang pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif; 3) Berperan penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah, sehingga menjadi bagian integral dari proses politik yang lebih luas; 4) Membangun hubungan erat dengan berbagai kelompok swasta dan individu untuk memfasilitasi penyediaan layanan kepada publik; 5) Dalam beberapa konteks, menunjukkan perbedaan konsep dibandingkan dengan paradigma administrasi individual.

Michael M. Harmon & Richard T. Mayer (dalam Selang, 2016:42), yang menunjukkan administrasi publik, tetapi tidak terbatas pada pihak yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah. Administrasi publik berurusan dengan keputusan:

1. Pengaruh terhadap masyarakat;
2. Atas nama rakyat;
3. Gunakan sumber daya bersama.

Berdasarkan beberapa definisi terkait administrasi publik yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli, mampu diambil kesatuan mengenai definisi administrasi publik. Administrasi publik merupakan tindakan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur publik dengan tujuan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kepentingan publik sesuai dengan target yang telah diharapkan.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merujuk pada pola pikir individu atau kelompok. Menurut Thomas S. Kuhn dalam Syafie (2010:26), paradigma diartikan sebagai prinsip atau sudut pandang terhadap pemecahan masalah tertentu yang muncul dalam konteks masyarakat pada suatu periode waktu tertentu. Nicholas Henry (1995:21-49) menyatakan bahwa ada enam perspektif pakar yang dapat diterapkan pada paradigma ilmu administrasi publik, yang dikenal sebagai enam paradigma administrasi publik. Berikut adalah penjelasan mengenai paradigma-paradigma tersebut :

a) Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma administrasi dan dikotomi politik. Tokoh-tokoh dari paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D.

White. Dalam tulisannya yang berjudul "*Politics and Administration*", Goodnow menyatakan adanya pemisahan antara politik dan administrasi, di mana politik berfokus pada perumusan kebijakan sebagai ekspresi kehendak masyarakat melalui legislatif, sedangkan administrasi menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. Fokus ilmu administrasi negara berada pada aspek kepegawaian, anggaran, dan organisasi, sementara ilmu politik berorientasi pada isu pemerintahan, politik, dan kebijakan.

b) Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma ini adalah Willoughby, L. Gullick dan L. Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Fayol dan Taylor memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fungsi atau fokus administrasi publik.

Paradigma ini menekankan penerapan prinsip-prinsip administrasi yang dirumuskan dalam konsep POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting). Prinsip-prinsip tersebut dianggap bersifat universal dan fleksibel sehingga dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi, termasuk pemerintahan. Fokus utama paradigma ini adalah pada prinsip administrasi, bukan pada lokusnya, karena diyakini relevan di berbagai konteks sosial budaya.

c) Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma ini memandang administrasi negara sebagai cabang dari ilmu politik, dengan tokoh utama Morstein-Marx melalui karyanya *Elements of Public*

Administration (1946). Ia meragukan validitas pemisahan politik dan administrasi karena sulit diterapkan dalam praktik. Herbert Simon turut mengkritik prinsip-prinsip administrasi yang dianggap tidak konsisten dan tidak universal, serta menegaskan bahwa administrasi tidak bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh nilai politik. Perdebatan muncul antara pandangan administrasi yang netral dengan pandangan yang sarat nilai politik, namun realitas lebih mendukung pandangan kedua. John G bahkan menegaskan bahwa teori administrasi publik adalah bagian dari teori politik, sehingga birokrasi pemerintahan menjadi lokus utama. Meski begitu, fokus administrasi publik menjadi kabur dan memunculkan krisis identitas karena para pengkritik tidak memberi arahan yang jelas mengenai orientasi keilmuannya.

d) Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma administrasi publik sebagai cabang dari ilmu administrasi. Pada paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang muncul dalam ketiga paradigma sebelumnya kemudian dikembangkan secara natural dan menyeluruh. Paradigma ini mengutamakan fokus tanpa menentukan lokus spesifiknya. Fokusnya terpusat pada analisis sistem dan manajemen, riset operasi, teknologi modern, dan perilaku organisasi. Paradigma ini berkembang dalam dua arah, yaitu :

- a. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengembangan ilmu administrasi sebagai disiplin murni, dengan dukungan teori-teori yang berasal dari psikologi sosial sebagai landasan ilmiahnya.

- b. Pendekatan ini berfokus pada studi kebijakan publik, dengan asumsi bahwa konsep-konsep yang digunakan dapat diterapkan secara universal, baik dalam sektor bisnis maupun administrasi publik. Akibatnya, batasan atau lokus dari ilmu administrasi menjadi kabur karena kehilangan kejelasan konteks penerapannya.

e) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1956-1970)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma administrasi publik dalam konteks administrasi publik itu sendiri. Paradigma ini mencerminkan administrasi negara yang berkembang menjadi ilmu administrasi publik yang telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Paradigma ini difokuskan pada teori kebijakan publik, teori manajemen dan teori organisasi. Lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik, urusan hukum, urusan publik, dan kebijakan publik. Dalam teori organisasi terdapat beberapa pertanyaan:

- a. Bagaimana dan mengapa organisasi bekerja
- b. Bagaimana dan mengapa organisasi bertindak
- c. Bagaimana dan mengapa keputusan dibuat.

f) Administrasi Publik Sebagai Governance (1990-Sekarang)

Paradigma tata kelola (*governance*) muncul pada akhir 1990-an sebagai paradigma terakhir dalam administrasi publik yang berhubungan erat dengan pemerintahan. Menurut Tamagoya (Ikeanyibe, Ezre Ori, & Okoye, 2017), *governance* menekankan otoritas pemimpin politik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan melibatkan berbagai sektor dalam perumusan kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat dan institusi. *Governance*

terbagi ke dalam bentuk *good governance*, *network governance*, dan *collaborative governance*. Paradigma ini menempatkan tiga aktor utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang bersama-sama berperan dalam memenuhi kebutuhan publik. Dalam konteks ini, peran pemerintah bergeser dari aktor dominan menjadi fasilitator yang membangun kemitraan, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal, efisien, dan akuntabel.

Dalam penelitian ini yang mengkaji kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang berada pada paradigma kelima yaitu paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik dipandang paling relevan dalam penelitian ini karena menempatkan organisasi pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan urusan publik. Paradigma ini merupakan bagian dari pendekatan manajemen publik yang memfokuskan pada bagaimana organisasi sektor publik dikelola untuk mencapai tujuan-tujuan publik secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berperan sebagai institusi publik yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pengelolaan sampah.

Ruang lingkup Administrasi Publik bersifat kompleks dan berkembang sesuai dengan kebutuhan serta dinamika masyarakat. Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:8), lingkup Administrasi Publik meliputi tiga unsur utama, yakni organisasi publik yang membahas model organisasi dan perilaku birokrasi; manajemen publik yang mencakup sistem pengelolaan program, anggaran, serta

sumber daya manusia; dan implementasi publik yang berkaitan dengan kebijakan, privatisasi, administrasi antar pemerintah, hingga etika birokrasi. Secara garis besar, ruang lingkup Administrasi Publik dapat dipahami dalam dua aspek besar, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik yang saling terkait dalam penyelenggaraan organisasi publik.

1.6.4 Manajemen Publik

Manajemen merupakan suatu proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry (1972), manajemen adalah proses khas yang terdiri atas *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* guna menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan orang dan sumber daya. Henry Fayol (1916) menambahkan fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan. Dalam konteks publik, manajemen dipadukan dengan nilai-nilai pelayanan masyarakat. Publik sendiri merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama dalam sistem pemerintahan, di mana pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan secara adil, merata, dan transparan (Denhardt & Denhardt, 2003). Dengan demikian, manajemen publik dapat disimpulkan sebagai pendekatan komprehensif untuk mengelola sumber daya sektor publik, memastikan tercapainya tujuan organisasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang baik.

1.6.5 Konsep Kinerja

1.6.5.1 Kinerja

Kinerja pada dasarnya merupakan kesediaan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan tugas serta menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan (Rivai, 2005; Sinambela, 2012). Secara etimologis, istilah kinerja berasal dari bahasa Inggris *performance* yang berarti penampilan atau hasil kerja. Menurut Wibowo (2013), kinerja berhubungan erat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan kontribusi terhadap ekonomi. Sejak gagasan Woodrow Wilson yang menekankan pentingnya efisiensi dalam administrasi publik dan F.W. Taylor dengan prinsip manajemen ilmiahnya, kinerja mulai dianggap sebagai aspek penting yang harus diukur.

Beberapa ahli menekankan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang atau kelompok dalam organisasi yang sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, serta norma hukum, moral, dan etika (Prawirosentono dalam Sinambela, 2012; Sedarmayanti, 2007). Simamora (2004) menyebutkan bahwa kinerja tercermin dari output, baik berupa fisik maupun nonfisik. Hasibuan (2001) menambahkan bahwa kinerja juga menyangkut upaya peningkatan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kinerja tidak hanya dipahami sebagai hasil kerja, tetapi juga sebagai proses pengembangan kualitas individu dalam organisasi.

Hariandja (2002) dan Dwiyanto (2006) menekankan bahwa kinerja dapat dilihat dari perilaku nyata pegawai dalam menjalankan perannya serta sejauh mana organisasi berhasil mencapai misinya. Widodo (dalam Tona Aurora Lubis,

2014) juga menyatakan bahwa kinerja adalah aktivitas yang dilakukan dan disempurnakan sesuai tanggung jawab hingga menghasilkan capaian yang diharapkan. Secara umum, kinerja dapat disimpulkan sebagai hasil kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang dicapai individu atau organisasi sesuai dengan tanggung jawabnya. Tingginya volume output yang dihasilkan menunjukkan semakin baik tingkat efisiensi, efektivitas, dan prestasi kinerja dalam suatu organisasi.

1.6.5.2 Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan representasi dari aktivitas yang dilakukan organisasi dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, kinerja mencerminkan efektivitas organisasi dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan visi dan misi. Bryson (dalam Sembiring, 2012) menegaskan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil kolaborasi antara anggota dan komponen organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga oleh sinergi antar bagian yang ada di dalamnya.

Wibawa dan Atmosudirjo (dalam Pasolong, 2011) memandang kinerja organisasi sebagai efektivitas menyeluruh dalam memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan, melalui pendekatan sistematis dan peningkatan kapasitas berkelanjutan. Mahsun (2006) menambahkan bahwa kinerja organisasi adalah tingkat pencapaian kegiatan, program, atau kebijakan tertentu yang mendukung realisasi tujuan, misi, dan visi. Sejalan dengan itu, Etzioni (dalam

Keban, 2008) menekankan bahwa kinerja organisasi menunjukkan sejauh mana tujuan akhir dapat direalisasikan, sehingga menjadi indikator penting keberhasilan organisasi.

Bastian (dalam Tangkilisan, 2005) menyoroti bahwa kinerja organisasi mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Mulyadi (2006) menambahkan bahwa kinerja tidak hanya dilihat dari pencapaian internal, tetapi juga dari kepuasan pelanggan serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat dipahami sebagai kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, baik dalam pencapaian tujuan internal maupun dalam memberikan dampak positif secara eksternal.

1.6.5.3 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat, mengevaluasi, dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, serta strategi yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Robertson (dalam Mohamad, 2006) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja mencakup beberapa komponen, yakni efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas output yang terkait dengan kepuasan penerima manfaat, kesesuaian antara hasil dengan tujuan, serta efektivitas tindakan dalam mewujudkan sasaran yang dirumuskan. Dengan demikian, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai

arah yang ditetapkan sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan program.

Nurmandi (1999:193) menyatakan bahwa efisiensi ditunjukkan oleh rasio minimal antara input dan output, sedangkan efektivitas lebih menekankan pada pencapaian tujuan organisasi, misalnya tingkat kepuasan masyarakat. Artinya, pengukuran kinerja tidak hanya menilai penggunaan sumber daya secara optimal, tetapi juga sejauh mana organisasi mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai harapan masyarakat.

Menurut Robins (dalam Nurhalimah & Amirulmukminin, 2023), terdapat empat dimensi utama yang dapat dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana kinerja organisasi tercapai, yaitu:

1. Kualitas, berkaitan dengan mutu dari hasil pekerjaan, mencakup tingkat ketelitian, kecermatan, serta minimnya kesalahan dan kerusakan. Semakin baik kualitas yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Kuantitas. mengacu pada jumlah atau volume pekerjaan yang mampu diselesaikan dalam periode tertentu. Aspek ini menekankan pada produktivitas pegawai dan kemampuan organisasi dalam memenuhi target yang telah ditentukan.
3. Ketepatan Waktu, menunjukkan efektivitas dalam memanfaatkan waktu kerja, baik dari segi penyelesaian tugas, tingkat kehadiran pegawai, maupun kedisiplinan terhadap jadwal. Aspek ini menjadi penting karena pelayanan publik sangat bergantung pada konsistensi waktu.

4. Efektivitas, menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian efektivitas dilihat dari sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana, meliputi keterpaduan antara kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.

Menurut (Agus Dwiyanto et al., 2012) dalam Buku berjudul Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia menyebutkan terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan dalam menilai kinerja organisasi publik diantaranya yaitu:

- a. Produktivitas

Produktivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Konsep produktivitas menunjukkan sejauh mana suatu layanan publik mampu menghasilkan output yang sesuai dengan target atau harapan yang telah ditetapkan. Produktivitas pada dasarnya dipahami sebagai perbandingan antara *input* dan *output*. Indikator produktivitas menilai seberapa besar hasil yang dicapai (*output*) dengan seluruh sumber daya yang digunakan (*input*) dalam periode waktu tertentu.

- b. Kualitas layanan

Kualitas Layanan merupakan tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan standar, kebutuhan, dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kualitas ini mencerminkan sejauh mana pelayanan mampu memberikan kepuasan, kenyamanan, serta memenuhi ekspektasi publik secara konsisten. Kualitas layanan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja organisasi publik, karena berbagai pandangan negatif terhadap instansi pemerintah umumnya

muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima dapat digunakan untuk menilai kualitas layanan.

c. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan suatu organisasi atau aparaturnya untuk merespons kebutuhan, keluhan, dan harapan masyarakat secara cepat, tepat, dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Indikator ini menunjukkan sejauh mana organisasi publik mampu menjalankan misi dan tujuannya. Tingkat responsivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah justru mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara pelayanan dan harapan publik. Kondisi tersebut menandakan bahwa organisasi belum berhasil mencapai tujuannya dan dapat berdampak pada menurunnya kinerja.

d. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan bentuk tanggung jawab suatu organisasi atau aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan, prosedur, serta standar yang telah ditetapkan. Responsibilitas menggambarkan sejauh mana kegiatan dalam organisasi publik dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang tepat serta mematuhi kebijakan organisasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu organisasi atau aparaturnya untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber

daya kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat, sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai kewajiban instansi publik untuk mengawasi serta mengarahkan penggunaan kebijakan dan sumber daya secara konsisten sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dari indikator-indikator pengukuran kinerja di atas, peneliti memilih untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006:50), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima indikator ini dianggap mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja organisasi publik karena mencakup aspek efisiensi, efektivitas, kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat, kepatuhan terhadap aturan, serta konsistensi dengan nilai dan norma yang berlaku. Dengan menggunakan indikator tersebut, peneliti dapat menilai kinerja organisasi publik secara lebih objektif dan mendalam.

1.6.5.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

Kinerja organisasi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas, pemanfaatan sumber daya, dan pencapaian hasil yang efektif dan efisien. Menurut Armstrong dan Baron (1998 16-17), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Personal (*Personal Factor*)

Faktor personal merupakan aspek yang berkaitan dengan karakteristik, kemampuan, dan kondisi individu yang mempengaruhi cara seseorang menjalankan tugas atau pekerjaannya. Faktor ini berkaitan dengan karakteristik individu yang mencakup tingkat keterampilan, kompetensi, motivasi, dan komitmen yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi kompetensi dan motivasi individu, maka semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2. Faktor Kepemimpinan (*Leadership Factor*)

Faktor kepemimpinan merupakan aspek yang berkaitan dengan peran, gaya, serta kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan seorang manajer atau pemimpin tim dalam memberikan arahan, dorongan, bimbingan, serta dukungan yang diperlukan oleh anggota tim. Kepemimpinan yang baik mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan semangat kerja, dan mendorong tim untuk mencapai hasil terbaik secara bersama-sama.

3. Faktor Tim (*Team Factor*)

Faktor tim merupakan aspek yang berkaitan dengan dinamika kerja kelompok, termasuk koordinasi, kolaborasi, dan hubungan antar anggota tim yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. Faktor ini mencerminkan sejauh mana kualitas hubungan kerja dan dukungan yang diberikan oleh rekan kerja dalam suatu tim.

4. Faktor Sistem (*System Factor*)

Faktor sistem merupakan aspek yang berkaitan dengan prosedur, mekanisme, serta struktur kerja yang diterapkan dalam organisasi dan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian kinerja secara keseluruhan. Sistem yang terstruktur dan fasilitas yang memadai akan membantu individu bekerja secara lebih efisien dan efektif. Begitupun sebaliknya, apabila ada ketidakteraturan sistem atau kurangnya fasilitas dapat menghambat proses kerja.

5. Faktor Kontekstual atau Situasional (*Contextual/Situational Factor*)

Faktor kontekstual atau situasional merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi lingkungan eksternal maupun situasi tertentu yang dapat memengaruhi proses kerja, pengambilan keputusan, serta pencapaian kinerja dalam suatu organisasi. Faktor ini mencakup kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan tekanan atau perubahan yang mempengaruhi kinerja. Tekanan kerja yang tinggi, dinamika pasar, perubahan regulasi, maupun konflik internal dapat menjadi tantangan yang memerlukan adaptasi cepat. Organisasi yang mampu membaca dan merespons situasi dengan baik akan lebih siap menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerjanya di tengah perubahan.

Menurut Soesilo (dalam Tangkilisan, 2005:180), kinerja organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mencerminkan hubungan internal dalam organisasi yang berkaitan langsung dengan pembagian fungsi dan tugas antar unit kerja.

Struktur ini menentukan bagaimana aktivitas organisasi dijalankan secara terkoordinasi dan efisien.

b. Kebijakan Pengelolaan

Kebijakan pengelolaan organisasi merujuk pada keberadaan visi dan misi yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi. Visi dan misi yang jelas dan realistis akan memberikan arah strategis serta menjadi dasar dalam perumusan tujuan dan program kerja organisasi.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Karyawan yang kompeten, profesional, serta memiliki motivasi dan integritas yang tinggi akan mampu bekerja secara optimal dan berkontribusi secara signifikan terhadap produktivitas organisasi.

d. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen berkaitan dengan mekanisme pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data serta informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.

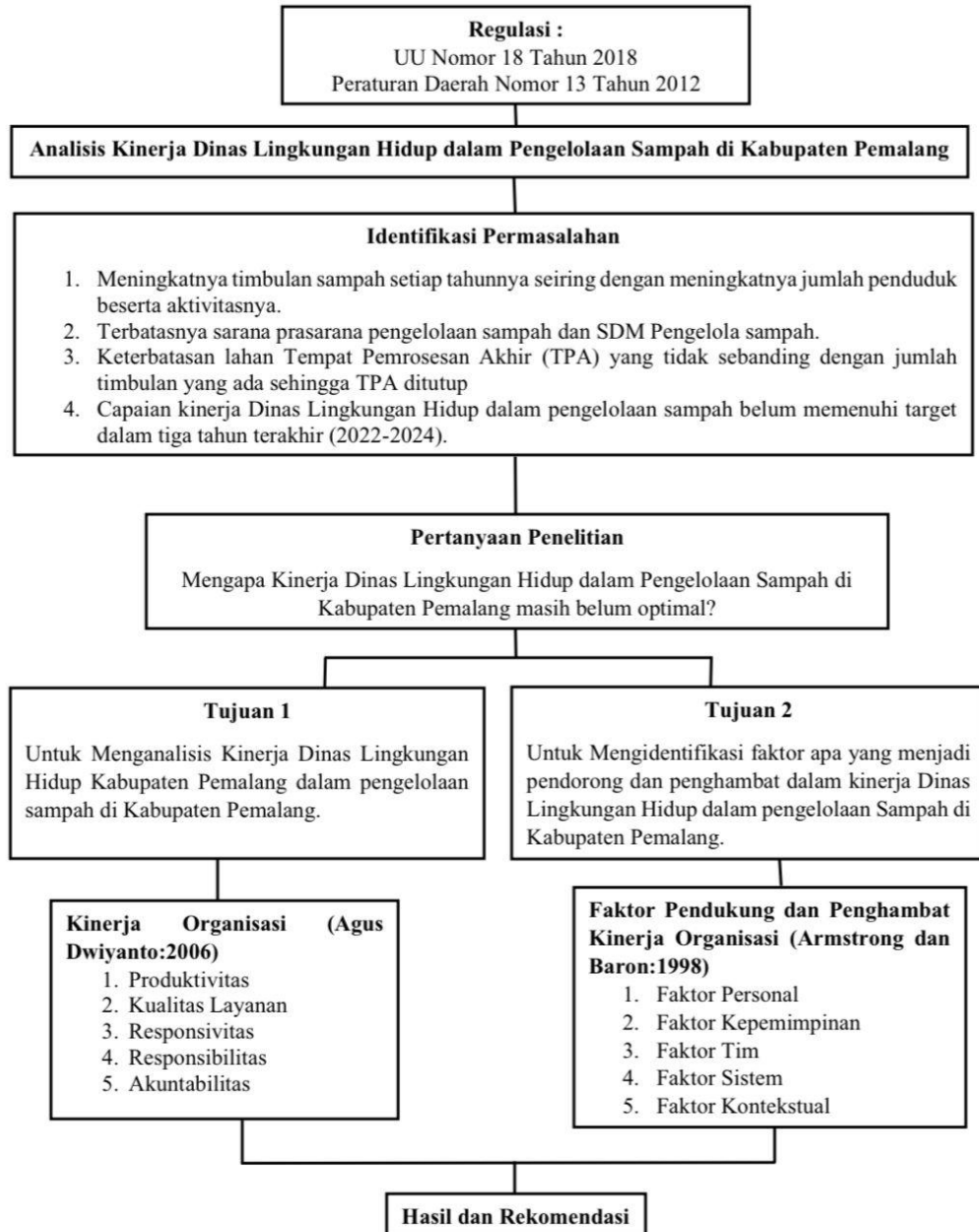
e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung teknis yang mencakup peralatan, infrastruktur, dan teknologi yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas organisasi.

Kinerja organisasi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor pendukung maupun penghambat, baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Faktor faktor tersebut dapat mempengaruhi dalam proses mencapai tujuan

organisasi, yang bisa jadi menjadi penghambat atau pendorong pencapaian tujuan organisasi serta secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi menurut Menurut Armstrong dan Baron (1998 16-17), yaitu faktor personal, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual/situasional. Faktor-faktor yang dipilih karena kelima faktor tersebut mencakup aspek internal dan eksternal organisasi, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara tepat apa saja yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja organisasi, khususnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik seperti pengelolaan sampah.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini secara khusus menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sampah. Permasalahan sampah menjadi isu penting karena menyangkut kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik di daerah. Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan dan program pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah di lapangan. Fokus penelitian ini diarahkan pada sejauh mana kinerja DLH dalam menjalankan fungsi dan programnya guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang. Untuk mengukur kinerja tersebut, peneliti menggunakan indikator kinerja organisasi, adapun penjabaran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Produktivitas merupakan perbandingan antara input dan output yang dihasilkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Gejala yang diamati adalah :
 - a. Target Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
 - b. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM).
 - c. Kemampuan pegawai Pengelolaan Sampah dalam memanfaatkan fasilitas pendukung yang tersedia.
2. Kualitas Layanan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi, yang mencerminkan sejauh

mana pelayanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun Gejala yang diamati adalah :

- a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
 - b. Ketepatan jadwal pengangkutan sampah
 - c. Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan
3. Responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat terkait dengan masalah atau keperluan yang dihadapi. Adapun Gejala yang diamati adalah :
- a. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat
 - b. Tindak lanjut terhadap permasalahan penumpukan sampah di beberapa titik
 - c. Keterkaitan antara Program Kegiatan Dengan Kebutuhan
4. Responsibilitas merupakan kemampuan pegawai untuk menyesuaikan dalam melaksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab mengacu pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku. Adapun Gejala yang diamati adalah :
- a. Pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
 - b. Komitmen Pegawai dalam menjalankan program-program kebersihan yang telah ditetapkan pemerintah daerah
 - c. Tingkat Kemampuan dan Pemahaman DLH dalam Permasalahan Pengelolaan Sampah

5. Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk melakukan pertanggungjawaban setiap kegiatan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat dan pihak berwenang. Adapun Gejala yang diamati adalah :
- a. Transparansi laporan kinerja pengelolaan sampah
 - b. Keterbukaan informasi kepada masyarakat.
 - c. Tingkat Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Sampah
 - d. Tanggung jawab dalam capaian kinerja yang tidak terpenuhi

Penelitian ini juga menganalisis faktor pendorong dan penghambat kinerja organisasi. Berikut penjabaran faktor-faktor kinerja organisasi sebagai berikut :

1. Faktor Personal adalah sesuatu atau aspek yang melekat pada diri seseorang individu yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas. Faktor ini menentukan seberapa baik seorang pegawai dapat menjalankan perannya dalam organisasi. Adapun Gejala yang diamati adalah :
 - a. Tingkat keterampilan pegawai lapangan
 - b. Pengalaman kerja
 - c. Komitmen terhadap tugas
2. Faktor Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain atau bawahannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun Gejala yang diamati adalah :

- a. Kemampuan pimpinan dalam mengarahkan bawahan
 - b. Motivasi dan dorongan yang diberikan pemimpin kepada pegawai
3. Faktor tim merupakan sekelompok individu dengan keterampilan yang saling melengkapi serta memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama melalui proses kerja yang dilakukan secara kolaboratif. Dalam faktor ini, setiap anggota tim saling bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya. Adapun Gejala yang diamati adalah :
- a. Koordinasi antar pegawai
 - b. Kerja sama dan kekompakan tim lapangan
 - c. Frekuensi evaluasi dan monitoring kinerja
4. Faktor sistem merupakan sejumlah komponen yang saling berhubungan dan berfungsi secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Faktor ini merupakan bagian dari sistem kerja, sarana atau infrastruktur yang disediakan organisasi, alur proses yang dijalankan, serta budaya kinerja yang berkembang di dalam organisasi. Adapun Gejala yang diamati adalah :
- a. Ketersediaan Anggaran dalam pengelolaan sampah
 - b. Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Kerja
5. Faktor Kontekstual/Situasional adalah faktor yg berasal dari luar organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, baik dari lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Adapun Gejala yang diamati adalah :
- a. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah
 - b. Tekanan dari masyarakat/media sosial

1.9 Argumen Penelitian

Dalam organisasi sektor publik kinerja yang optimal menjadi tolok ukur keberhasilan suatu instansi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menyoroti permasalahan ketidakoptimalan kinerja organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, khususnya dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik tentang Analisis Kinerja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori Agus Dwiyanto tentang kinerja organisasi, yang mencakup lima aspek kinerja yang harus ditunjukkan oleh organisasi, yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor Pendorong dan Penghambat kinerja organisasi berdasarkan teori Armstrong dan Baron, yang meliputi faktor personal, kepemimpinan, tim, sistem, dan kontekstual/situasional. Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di masa yang akan datang.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Desain atau Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti melalui interaksi peneliti dengan informan. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan gejala atau keadaan apa adanya sesuai kondisi di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa narasi, dokumen, maupun gambar, bukan angka-angka. Menurut Meleong (2019: 06), penelitian kualitatif berupaya memahami perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek dalam konteks alami tanpa manipulasi, dengan memanfaatkan metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Melalui metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi isu-isu utama, kemudian menyajikan data secara mendalam dan komprehensif. Pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif dinilai tepat karena memungkinkan pengumpulan data yang detail, menghasilkan deskripsi yang lebih jelas mengenai kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya, serta memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Sesuai dengan judul “Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pematang Jaya” maka situs penelitian ini tentu saja dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup yang

beralamat di Jl. Gatot Subroto No.28, Bojongbata, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52319.

1.10.3 Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan lokasi penelitian, Informan utama terdiri dari aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang. Di dalam menentukan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*, penjelasan mengenai teknik pengambilan sampel berupa sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu menurut pihak yang langsung memiliki keterkaitan dengan suatu permasalahan. Oleh karena itu, subjek penelitian dalam penelitian ini yakni: Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Pengelola TPS/TPA, dan Masyarakat Sekitar Kabupaten Pemalang.

Tabel 1.7

Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Alasan Pemilihan
1.	Kepala Bidang Pengendalian Konservasi dan Lingkungan	Bertanggung jawab atas semua alokasi sumber daya dan kebijakan pembiayaan persampahan.
2.	Kepala UPTD Unit Kebersihan dan Persampahan	Memiliki peran teknis dan banyak terlibat langsung di lapangan, jadi mengetahui operasional persampahan, ketersediaan SDM, armada, dan sarana prasarana.
3.	Staff Bidang Pengendalian Konservasi dan Lingkungan	Pekerjaan informan berkaitan dengan Pengelolaan persampahan
4.	Pengelola TPS/TPA	Terlibat langsung di lapangan
5.	Masyarakat	Pihak yang terdampak

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

1.10.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015), jenis data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data kualitatif yang berbentuk teks, simbol, dan kata-kata tertulis serta data kuantitatif yang berbentuk angka dan kalimat atau kata-kata. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data penelitian yang berbentuk pernyataan bukan dalam bentuk angka, kalimat atau kata-kata. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dimana peneliti menggunakan teks ataupun kata-kata tertulis untuk menganalisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang.

1.10.5 Sumber Data

Menurut Hasan (2020:82), data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang disajikan dalam bentuk simbol, kode, angka, dan bentuk lainnya. Disisi lain, sumber data merujuk pada subjek dari mana data atau informasi tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan dengan peneliti, sehingga data yang dikumpulkan lebih jelas, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam Penelitian Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang Data Primer dikumpulkan melalui :

a. Informan

Informan merupakan individu yang menyediakan wawasan mengenai situasi dan kondisi yang relevan dengan penelitian yang terdiri dari Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Pengelola TPS/TPA Kabupaten Pemalang, dan Masyarakat Kabupaten Pemalang.

b. Peristiwa

Kejadian di lokasi penelitian didefinisikan sebagai fenomena atau peristiwa yang disaksikan atau dialami disana, dalam konteks penelitian ini peristiwa diamati pada Kabupaten Pemalang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan Informasi yang berasal dari sumber selain pengumpulan data seperti bahan tertulis atau orang lain. Data sekunder yang dibutuhkan penelitian ini terdiri dari dokumen, catatan di internet, buku, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan kinerja pengelolaan sampah yang dikumpulkan dan dianalisis. Informasi dari data sekunder ini memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang kebijakan yang sedang diteliti, serta membantu memperkuat, dan melengkapi temuan dari data primer.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017), pengumpulan data merupakan tahap paling strategis karena bertujuan memperoleh data yang relevan dan valid. Tahap ini diperlukan pendekatan yang tepat agar data yang dikumpulkan akurat dan lengkap. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang

dirancang untuk memperoleh informasi secara komprehensif dan mendalam, meliputi:

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung yang ada di lapangan berdasarkan sumber informasi di lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pengamatan langsung terhadap kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang terkait pengelolaan sampah.

Melakukan observasi langsung dan mencatat data adalah langkah penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti mencakup:

- a. Pencatatan: Menulis catatan rinci tentang aspek-aspek yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian;
- b. Dokumentasi Kegiatan: Mengambil foto, video, atau membuat deskripsi tertulis dari aktivitas yang diamati;
- c. Pengumpulan Arsip: Mengumpulkan laporan, dokumen resmi, dan catatan lainnya yang relevan dengan penelitian dari lokasi penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dan komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam, terutama hal-hal yang tidak dapat ditemukan dalam data dokumentasi atau yang masih belum jelas. Melalui

wawancara, peneliti dapat memahami lebih jauh persepsi dan pengalaman responden.

Wawancara dalam penelitian ini mengenai bagaimana kinerja pengelolaan sampah di kabupaten pemalang apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Metode ini melibatkan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang relevan. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Informan penelitian ini dipilih menggunakan *purposive sampling*, yang berarti peneliti secara khusus memilih individu dan lokasi penelitian karena mereka memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah penelitian dan fenomena yang diselidiki (Creswell, 2015). Dalam mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, peneliti melakukan komunikasi langsung dengan informan. Informan pada penelitian ini mencakup :

1. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
2. Kepala UPTD Unit Persampahan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
3. Staff Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
4. Pengelola TPS/TPA Kabupaten Pemalang
5. Pengelola TPS/TPA Kabupaten Pemalang
6. Masyarakat Kabupaten Pemalang
7. Masyarakat Kabupaten Pemalang

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang asalnya dari dokumen lembaga atau organisasi maupun perorangan. Tujuan dari dokumentasi yaitu untuk mendapatkan bukti berupa foto, video atau dalam bentuk catatan yang berasal dari subjek penelitian ataupun lokasi penelitian. Data yang dicari berupa data kinerja pengelolaan sampah. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup proses pencatatan secara sistematis dan pemanfaatan data yang telah tersedia di instansi terkait penelitian. Data tersebut mencakup dokumen dan arsip yang memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, sumber utama data yang digunakan berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif dengan tujuan merangkum data secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan adalah analisis dominan, yaitu pendekatan yang berfungsi untuk memperoleh pemahaman secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Mengacu pada teori *Miles, Huberman dan Saldana* (2014), proses analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan antara lain :

1. Kondensasi Data merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dan dokumen-dokumen lainnya. Data yang telah dipilih

kemudian akan dikaitkan dengan kerangka teoritis yang digunakan oleh peneliti. Dalam tahap ini, peneliti akan menyusun dan memilih data yang relevan dengan gejala yang ada dalam teori analisis kinerja organisasi publik.

2. Penyajian Data adalah tahap mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, maupun hubungan antar kategori. Tujuannya agar peneliti lebih mudah membaca situasi, memahami makna yang muncul, serta menentukan langkah kerja berikutnya.
3. Penarikan Kesimpulan merupakan proses menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap, baik berupa deskripsi, pemahaman, maupun gambaran objek penelitian yang awalnya kurang jelas.

Berdasarkan ketiga tahapan analisis data tersebut, setiap langkah saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dirangkum serta memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan topik penelitian, yaitu Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang. Hasil tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif, dan pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data serta informasi yang berhasil dihimpun selama proses penelitian.

1.10.8 Kualitas Data dan Validitas Data

Menguji validitas data yang dikumpulkan adalah tujuan dari tahap terakhir proses penelitian yang dikenal sebagai tahap penilaian kualitas data. Dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi guna memastikan keabsahan data. Menurut Lexy J. Moelong (2007:330), triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari sumber atau cara yang berbeda untuk memastikan kebenaran informasi. Menurut (Sugiyono, 2018) teknik triangulasi terbagi menjadi 4 yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi jenis ini dilakukan dengan cara memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Artinya, data yang sama dicek ulang dengan membandingkan hasil perolehannya dari narasumber yang berbeda guna mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai suatu fenomena atau permasalahan.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode, peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan survei. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan memperkuat reliabilitas data.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang proses pengumpulan data menggunakan metode yang sama, tetapi pada waktu atau situasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi

data yang diperoleh, apakah tetap sama atau berubah ketika dikumpulkan pada kondisi yang berbeda.

4. Triangulasi Teknik

Bentuk triangulasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber data yang sama. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara dapat dikonfirmasi ulang melalui studi pustaka, dokumentasi, maupun observasi langsung. Dengan demikian, satu sumber data diuji melalui beberapa pendekatan untuk memperkuat kredibilitas dan integritas informasi yang diperoleh.

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode sebagai langkah untuk menjamin keabsahan data. Pada triangulasi sumber, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber yang berbeda guna melihat konsistensi data. Sedangkan, triangulasi metode dilakukan dengan cara memadukan wawancara dan observasi sebagai instrumen utama untuk mengecek kebenaran data, di mana responden yang diwawancarai pun berasal dari latar belakang yang berbeda namun masih sesuai dengan kriteria informan yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah data dikumpulkan, peneliti kemudian melakukan proses analisis dengan membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi yang tersedia, guna memastikan validitas data.